

JURNAL PERENCANAAN WILAYAH

e-ISSN: 2502 – 4205

Vol.IV., No.2, Oktober 2020

<http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppw>

**ANALISIS PERMASALAHAN KEBIJAKAN DALAM PEMBIAYAAN
PEMELIHARAAN JALAN KOTA WANGGUDU KABUPATEN
KONAWE UTARA**

Darwin¹⁾, Muh. Syarif²⁾, Edward Ngii³⁾

¹⁾Program Studi Perencanaan Wilayah, Pascasarjana UHO, 2019

²⁾Perencanaan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHO

³⁾Teknik Sipil, Fakultas Teknik UHO

Email: ppwjurnal@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan Dalam Pembiayaan Pemeliharaan Jalan Kota Wanggudu Kabupaten Konawe Utara 2018 dengan maksud untuk mendapatkan informasi secara obyektif dalam pelaksanaan kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota Wanggudu Kabupaten Konawe Utara masa pelaksanaan 2014 -2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ruas-ruas jalan, dan penentuan prioritas penanganan pemeliharaan jalan serta menganalisis kebijakan pembiayaan dan pemeliharaan jalan di Kota Wanggudu Raya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang mendeskripsikan kesesuaian antara kebijakan dengan penganggaran. Data diperoleh dari pengamatan (observasi) secara langsung, kemudian data lainnya berupa data Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara serta penganggaran dan kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah. Obyek penelitian adalah ruas jalan kota Wanggudu yang berjumlah 15 ruas jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 ruas jalan terdapat pemeliharaan rutin diberikan kepada 6 ruas jalan dengan total panjang 24,38 km, kemudian pemeliharaan berkala diberikan kepada 6 ruas jalan dengan total panjang 7 km, serta peningkatan diberikan kepada 2 ruas jalan dengan total panjang 1,5 km dan rekonstruksi diberikan hanya kepada 1 ruas jalan dengan total panjang ruas jalan 5,82 km. Kemudian dari alokasi dana berdasarkan kemampuan daerah menunjukkan bahwa realisasi pembiayaan untuk pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan dan rekonstruksi hanya dapat tercapai sebesar 75,95%

Kata Kunci : Kebijakan, Pembiayaan, Pemeliharaan

Policy Issues Analysis in Maintenance Finance Street Wanggudu City North Konawe Regency

Darwin¹⁾, Muh. Syarif²⁾, Edward Ngii³⁾

¹⁾Program Studi Perencanaan Wilayah, Pascasarjana UHO, 2019

²⁾Perencanaan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHO

³⁾Teknik Sipil, Fakultas Teknik UHO

Email: ppwjurnal@gmail.com

ABSTRACT

Policy in financing the maintenance of Wanggudu City Road North Konawe Regency 2018 with the intention to obtain information objectively in the implementation of the Wanggudu City Road Maintenance Policy in North Konawe Regency implementation period 2014 - 2018. This study aims to identify road segments, and determine priorities for road maintenance and analyze road financing and maintenance policies in Wanggudu Raya City. There are 15 city roads that were sampled in the study. Data obtained from observations (observations) directly, then other data in the form of Regional Spatial Detail Plan Data Data obtained from observations (observation) directly, then other data in the form of Spatial Detail Plan for North Konawe Regency and budgeting and policies contained in local regulation. The object of the research is the 15 Wanggudu city road sections, North Konawe Regency roads and the budgeting and policies contained in the regional regulations. The object of research is Wanggudu city road sections, amounting to 15 road sections. The results showed that of the 15 roads there were routine maintenance given to 6 roads with a total length of 24,38 km. Then periodic maintenance is given to 6 roads with a total length of 7 km, and improvements are given to 2 roads with a total length of 1.5 km and reconstruction is given to only 1 road with a total length of 5,82 km. Then from the allocation of funds based on the ability of the region shows that the realization of financing for routine maintenance, periodic maintenance, improvement and reconstruction can only be achieved by 75.95%.

Keywords: Policy, Financing, Maintenance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seiring dengan dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah di Indonesia, tanggung jawab penyelenggaraan dalam pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan regional beralih ke pemerintah daerah. Peralihan tanggung jawab tersebut sudah sewajarnya harus dapat diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam kemampuan teknik, manajerial dan pembiayaan dalam penyelenggaraan jalan. Pemeliharaan perkerasan jalan telah lama dianggap sebagai faktor penting dalam menentukan efisiensi jaringan jalan. Namun, kegiatan ini selalu melibatkan tantangan yang berkaitan dengan penuaan perkerasan, mekanisme deteriorasi, dan keterbatasan anggaran yang tersedia (Zukhruf, 2019).

Secara umum penyebab kerusakan jalan ada berbagai sebab yaitu umur rencana jalan yang telah dilewati, genangan air pada permukaan jalan yang tidak dapat mengalir akibat drainase yang kurang baik, beban lalu lintas berulang yang berlebihan (*overloaded*) yang menyebabkan umur pakai jalan lebih pendek dari perencanaan. Perencanaan yang tidak tepat, pengawasan yang kurang baik dan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana yang ada, selain itu minimnya biaya pemeliharaan, keterlambatan pengeluaran anggaran serta prioritas penanganan yang kurang tepat juga menjadi penyebabnya (Wirnanda *et al.*, 2018).

Jalan memiliki peran dan fungsi utama dalam arus perpindahan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain, pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah, juga memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antar daerah serta mempercepat pengembangan wilayah dari keterisolasian (Armada, 2014). Pada umumnya setiap instansi pemerintahan yang melakukan pemeliharaan jalan nasional memiliki data jalan dan informasi, keterbatasan secara teknis baik sarana maupun prasarana dan sumberdaya menimbulkan banyak kendala dalam mengoptimalkan pengelolaan data jalan nasional. Hal ini menyebabkan tidak tersedianya data yang terpadu, dapat dipakai bersama serta kurang mampunya sistem yang

ada berkomunikasi secara universal (Pradity *et al.*, 2017).

Kegiatan pemeliharaan ialah bermacam-macam dan tersebar diseluruh kabupaten/kota, dan mengenai pekerjaan rutin sukar untuk diukur dan dikontrol. Sumber-sumber daya mungkin tidak digunakan secara efektif dan mesin-mesin mungkin menganggur karena kurangnya koordinasi. Hasilnya ialah bahwa pekerjaan pemeliharaan seringkali dilaksanakan dengan cara yang tidak efisien dan dengan tingkat produktifitas yang rendah. Persiapan kegiatan pemeliharaan jalan diperlukan untuk mengetahui kondisi perkerasan, yang akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan jenis perawatan yang dibutuhkan (Pramono & Mulyono, 2016). Lebih lanjut, Setianingsih (2016) pemeliharaan jalan dengan kondisi yang baik mencerminkan bahwa pelestarian memberikan hasil maksimal dengan biaya perawatan yang lebih efisien.

Setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Konawe Utara harus menyusun program pemeliharaan rutin dan berkala untuk 15 ruas jalan di Kota Wanggudu sepanjang 38,7 Km yang terdiri dari jalan arteri primer, lokal primer dan jalan lokal primer belum termasuk pemeliharaan jalan dalam kondisi darurat dan jalan lingkungan. Berdasarkan pengalaman selama ini penyusunan pembiayaan untuk prasarana jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Utara dimulai dengan pengumpulan data dan informasi.

Pengumpulan data dan informasi berasal dari surat-surat usulan penanganan jalan yang berasal dari masyarakat melalui perangkat dusun/desa dan kecamatan. Pendataan juga melalui aspirasi masyarakat melalui media surat kabar lokal. Selanjutnya dibentuk Tim Perencana Jalan Kabupaten yang bertugas dalam pelaksanaan pengukuran dan survei perencanaan teknis secara menyeluruh terhadap seluruh ruas jalan kabupaten dengan mempedomani petunjuk teknis perencanaan jalan. Evaluasi kerusakan jalan merupakan penilaian kondisi kerusakan permukaan jalan secara visual yang digunakan dalam menentukan bentuk pemeliharaan yang akan dilakukan (Rayendra, 2019).

Dalam mewujudkan suatu metoda penetapan prioritas penanganan pemeliharaan jalan di Kota Wanggudu Kabupaten Konawe Utara dalam upaya agar dana yang dialokasikan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi tercapainya fungsi yang optimal terhadap jaringan jalan di Kota Wanggudu dalam menunjang perekonomian Kabupaten Konawe Utara, maka perlu diidentifikasi proses penyusunan kebijakan dalam pembiayaan pemeliharaan jalan kabupaten di Kota Wanggudu. Keterbatasan pendanaan oleh pemerintah lokal dalam menangani pembiayaan pemeliharaan jalan tersebut dapat terlihat dari ketersediaan biaya pemeliharaan jalan yang tidak berimbang dengan kebutuhan pemeliharaan jalan secara keseluruhan.

Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui panjang, lebar dan struktur ruas-ruas jalan di kota Wanggudu ?
- 2) Untuk mengidentifikasi penentuan prioritas penanganan pemeliharaan jalan di Kota Wanggudu
- 3) Untuk menganalisis kebijakan pembiayaan dan pemeliharaan jalan di Kota Wanggudu Raya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang mendeskripsikan kesesuaian antara kebijakan dengan penganggaran. Data diperoleh dari pengamatan (observasi) secara langsung, kemudian data lainnya berupa data Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara serta penganggaran dan kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah. Obyek penelitian adalah ruas jalan kota Wanggudu yang berjumlah 15 ruas jalan.

Analisis Usulan Teknis dan Skala Prioritas

Analisis ini digunakan untuk mengkaji hasil pelaksanaan survey perencanaan teknis jalan kabupaten

berdasarkan masukan dari hasil Analisis Jalan (Analisis Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten).

Ada 2 (dua) kegiatan utama yaitu menganalisis dokumen usulan rencana kegiatan berdasarkan prioritas pemeliharaan jalan dan kegiatan kedua adalah menganalisis perencanaan teknis yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Utara. Hasil analisis ini dimungkinkan untuk mengetahui sejauh mana usulan dari instansi teknis bersifat konsisten dan konsekwen dalam pelaksanaan tugasnya.

Analisis Jalan

Proses perencanaan ini dapat dilihat sebagai satu seri prosedur penyaringan yang sistematis, yang secara progresif memperkecil jangkauan persoalan jaringan jalan yang sangat luas, ke sejumlah ruas jalan yang terbatas disesuaikan dengan kapasitas studi dan sumber biaya yang tersedia pada setiap program tahunan.

Identifikasi Kebijakan Dalam Pembiayaan Pemeliharaan Jalan Kabupaten

Tahapan berikutnya adalah mengidentifikasi berbagai kebijakan dalam upaya pembiayaan pemeliharaan yang distandarkan pada produk kebijakan seperti RAPBD dan Perda Kabupaten Konawe Utara, yang dimulai dari usulan dinas/instansi, hasil proses pembahasan, hingga sampai kepada Rancangan APBD dan berakhir dengan penetapan PERDA APBD Kabupaten Konawe Utara.

Analisis Kelembagaan Penyusun Kebijakan

Pada tahapan ini akan dilakukan identifikasi serta menganalisis lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Konawe Utara yang terkait langsung terhadap proses kebijakan pembiayaan pemeliharaan jalan kabupaten. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui sistem pembentukan kebijakan pembiayaan pemeliharaan jalan yang dibuat berdasarkan sistem yang telah berjalan saat ini. Analisis kelembagaan penyusun kebijakan juga akan mencari tahu mengenai kedudukan masing-masing pelaku kebijakan

pembiayaan pemeliharaan jalan yang dilihat dari struktur organisasi kerja yang berlaku.

Untuk dapat mengetahui sistem kebijakan pembiayaan pemeliharaan jalan, digunakan model identifikasi terhadap formulasi kebijakan yang digunakan. Model identifikasi yang dilakukan merupakan ukuran standar yang digunakan untuk menilai proses evaluasi/identifikasi kinerja kelembagaan saat ini. Dalam identifikasi kebijakan kelembagaan dalam penelitian ini akan dibatasi dengan mengidentifikasi penyusunan kebijakan saja, karena dengan melakukan kajian kebijakan tersebut dapat merepresentasikan substansi dari kebijakan yang telah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Ruas Jalan Kajian

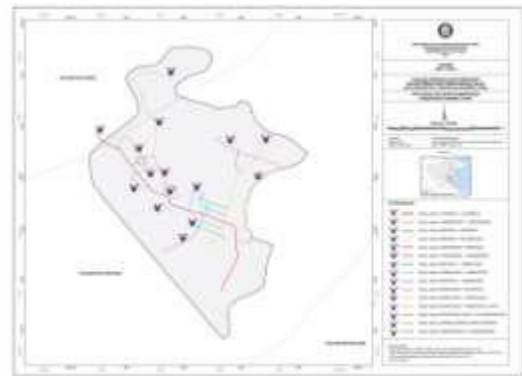
Data ruas jalan beserta kondisi kerusakan jalan berasal dari wilayah studi untuk jalan ibu kabupaten pada Koordinator Wilayah Wanggudu dan Andowia untuk usulan program tahun 2018 disajikan pada tabel 1,

Tabel 1. Data Kerusakan Jalan Beraspal pada Tahun 2018

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Lokasi Kecamatan	Panjang Ruas (km)	Vo lu me Kerusakan (km)	
					Ringan	Berat
1	401	Lahimbua -Lahimbua	Andowia	8,2	2,2	
2	402	Lamondowo – Laronanga	Andowia	4,46	1,46	
3	403	Andowia-Andowia	Andowia	3,54		
4	404	Andowia-Palabuhan	Andowia	5,82		2,50
5	405	Laronanga-Andowia	Andowia	2,57	1,57	
6	406	Larobende-Larobende	Andowia	1,57		
7	407	Andowia-Lambudoni	Andowia	2,20		
8	408	Lambudoni-Lambudoni	Andowia	1,16		
9	409	Mataiwoi-Lambudoni	Andowia dan Asera	2,17		
10	410	Wanggudu-Mataiwoi	Asera	1,55		
11	411	Wanggudu-Wanggudu	Asera	0,41	0,41	
12	412	Wanggudu-Wanggudu Raya	Asera	0,75		0,75
13	413	Puuwanggudu	Asera	0,75		0,75
14	414	Jaring -Jaring Perkantoran	Asera	2,8	2,8	
15	415	Punggomosi – punggomosi	Asera	0,75	0,75	
Jumlah				38,7	9,19	4

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Utara

Berdasarkan pada data inventarisasi jalan menyajikan jenis dan volume kerusakan berupa lubang dan retak yang selanjutnya akan dikonversi nilai kerusakan terhadap Indeks Kerusakan Jalan (IKJ).



Gambar 1. Peta ruas jalan Kota Wanggudu

Tahapan pembentukan nilai Indeks Kerusakan Jalan yang akan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Konversi Nilai Kondisi Jalan terhadap Indeks Kerusakan Jalan

No	Jalan Beraspal	Tingkat Kerusakan (m ² /km)			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	Lubang	0 – 40	40 – 200	200 – 600	> 600
	Indeks Kerusakan Jalan (IKJL)	0 – 4	4,1– 8	8,1 – 12	> 12
	Perumusan Konversi IKJL	$[\text{Skor}/40] \times 4$	$([\text{Skor}-40,1]/[200-40,1] \times [8-4,1]) + 4,1$	$([\text{Skor}-200,1]/[600-200,1] \times [12-8,1]) + 8,1$	$(\text{Skor}/600) \times 12$
	Retak	0– 100	100 – 500	500 – 1000	> 1000
	Indeks Kerusakan Jalan (IKJL)	0 – 4	4,1– 8	8,1 – 12	> 12
2	Perumusan Konversi IKJL	$[\text{Skor}/100] \times 4$	$([\text{Skor}-100,1]/[500-100,1] \times [8-4,1]) + 4,1$	$([\text{Skor}-500,1]/[1000-500,1] \times [12-8,1]) + 8,1$	$(\text{Skor}/1000) \times 12$

Sumber : Berdasarkan SK Data Base Jalan Kab. Konawe Utara Nomor : 48 Tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas selanjutnya dapat dilakukan perhitungan tiap-tiap ruas jalan berdasarkan volume kerusakannya.

Tabel 3. Nilai Indek Kerusakan Jalan

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Panjang Ruas (km)	Volumen Kerusakan (km)			
				Ringan	%	Berat	%
1	401	Lahimbua-Lahimbua	8,2	2,2	26.83		0
2	402	Lamondowo - Laronanga	4,46	1,46	32.74		0
3	403	Andowia- Andowia	3,54		0.00		0
4	404	Andowia-Palabuhan	5,82		0.00	2,50	42.96
5	405	Laronanga- Andowia	2,57	1,57	61.09		0
6	406	Larobende-Larobende	1,57		0.00		0
7	407	Andowia- Lambudoni	2,20		0.00		0
8	408	Lambudoni-Lambudoni	1,16		0.00		0
9	409	Mataiwoi-Lambudoni	2,17		0.00		0
10	410	Wanggudu-Mataiwoi	1,55		0.00		0
11	411	Wanggudu-Wanggudu	0,41	0,41	100.00		0
12	412	Wanggudu-Wanggudu Raya	0,75		0.00	0,75	100
13	413	Wanggudu raya-Puuwanggudu	0,75		0.00	0,75	100
14	414	Jaring -Jaring Perkantoran	2,8	2,8	100.00		0
15	415	Punggomosi - punggomosi	0,75	0,75	100.00		0
Jumlah			38,7	9,19		4	

Sumber : SK Jalan Kab. Konawe Utara (diolah)

Kebutuhan Penanganan Pemeliharaan Jalan

Data yang digunakan dalam menyusun kebutuhan penanganan jalan untuk semua ruas jalan yakni; ruas jalan yang saat ini dalam kondisi baik ditangani dengan pemeliharaan rutin, ruas jalan yang saat ini dalam kondisi sedang ditangani dengan pemeliharaan berkala, ruas jalan yang saat

ini dalam kondisi rusak ditangani dengan peningkatan dan ruas jalan yang saat ini dalam kondisi rusak berat ditangani dengan rekonstruksi. Untuk menghitung kebutuhan biaya penanganan tiap-tiap ruas jalan berdasarkan kaidah yang telah disampaikan diatas dengan jenis item pekerjaan dan harga satuan pekerjaan dengan anggapan 100% dana tersedia.

Tabel 4. Kebutuhan Biaya Penanganan Pemeliharaan

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kondisi Jalan	Jenis Penanganan	Biaya (Rp)
1	401	Lahimbua-Lahimbua	Sedang	Pemb. Berkala	12,848,398
2	402	Lamondowo - Laronanga	Sedang	Pemb. Berkala	8,526,664
3	403	Andowia-Andowia	Ringan	Rutin	20,674,241
4	404	Andowia-Palabuhan	Berat	Rekontruksi	1,605,873,665
5	405	Laronanga-Andowia	Sedang	Pemb. Berkala	9,169,084
6	406	Larobende-Larobende	Ringan	Rutin	9,169,084
7	407	Andowia-Lambudoni	Ringan	Rutin	12,848,398
8	408	Lambudoni-Lambudoni	Ringan	Rutin	6,774,610
9	409	Mataiwoi-Lambudoni	Ringan	Rutin	12,673,193
10	410	Wanggudu-Mataiwoi	Ringan	Rutin	9,052,281
11	411	Wanggudu-Wanggudu	Sedang	Pemb. Berkala	2,394,474
12	412	Wanggudu-Wanggudu Raya	Berat	Peningkatan	202,836,868
13	413	Wanggudu raya- Puuwanggudu	Berat	Peningkatan	202,836,868
14	414	Jaring -Jaring Perkantoran	Sedang	Pemb. Berkala	16,352,506
15	415	Punggomosi - punggomosi	Sedang	Pemb. Berkala	4,380,136
Jumlah					2,136,410,469

Sumber : SK Jalan Kab. Konawe Utara (diolah)

Penyusunan Prioritas Penanganan Pemeliharaan Jalan

Program Penanganan Jalan Tahunan dengan Skenario Alokasi Dana 100 % Ketersediaan Dana

Pemeliharaan jalan di wilayah ibu kota kabupaten pemeliharaan rutin diberikan kepada 6 ruas jalan dengan total panjang 24,38 km, pemeliharaan berkala diberikan

kepada 6 ruas jalan dengan total panjang 7 km, peningkatan diberikan kepada 2 ruas jalan dengan total panjang 1,5 km dan rekonstruksi diberikan hanya kepada 1 ruas jalan dengan total panjang 5,82 km. Total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 2.136.410.469,00. Dengan total panjang ruas jalan sebesar 38,7 Km. Resume alokasi biaya per jenis penanganan ditampilkan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Biaya Penanganan dengan Alokasi Dana 100 %

No.	Jenis Penanganan	Panjang Ruas Jalan (km)	Alokasi Biaya (Rp)
1	Rutin	24,38	71,191,806
2	Berkala	7	53,671,261
3	Peningkatan	1,5	405,673,735
4	Rekontruksi	5,82	1,605,873,666
Total			2,136,410,469

Sumber : SK Jalan Kab. Konawe Utara (diolah)

Program Penanganan Jalan dengan Skenario Alokasi Dana 75 % Ketersediaan Dana

Pemeliharaan jalan di wilayah ibu kota kabupaten pemeliharaan rutin diberikan kepada 6 ruas jalan dengan total panjang 24,38 km, pemeliharaan berkala diberikan

kepada 6 ruas jalan dengan total panjang 6,89 km, peningkatan diberikan kepada 2 ruas jalan dengan total panjang 1,125 km dan rekonstruksi diberikan kepada 1 ruas jalan dengan total panjang 1,875 km. Total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 1.620.105.803,00. Dengan total panjang ruas jalan sebesar 34,27 km.

Tabel 6. Biaya Penanganan dengan Alokasi Dana 75 %

No.	Jenis Penanganan	Panjang Ruas Jalan (km)	Alokasi Biaya (Rp)
1	Rutin	24,38	71,191,806
2	Berkala	6.89	40,253,446
3	Peningkatan	1.125	304,255,302
4	Rekontruksi	1.875	1,204,405,249
Total			1,620,105,803

Sumber : SK Jalan Kab. Konawe Utara (diolah)

Program Penanganan Jalan dengan Skenario Alokasi Dana 50% Ketersediaan Dana

Pemeliharaan jalan di wilayah ibu kota kabupaten pemeliharaan rutin diberikan kepada 6 ruas jalan dengan total panjang 24,38 km, pemeliharaan berkala diberikan

kepada 6 ruas jalan dengan total panjang 4.595 km, peningkatan diberikan kepada 2 ruas jalan dengan total panjang 0,75 km dan rekonstruksi diberikan kepada 1 ruas jalan dengan total panjang 1,25 km. Total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 1.103.801.138,00.

Tabel 7. Biaya Penanganan dengan Alokasi Dana 50 %

No.	Jenis Penanganan	Panjang Ruas Jalan (km)	Alokasi Biaya (Rp)
1	Rutin	24,38	71,191,806
2	Berkala	4.595	26,835,631
3	Peningkatan	0.75	202,836,868
4	Rekontruksi	1.25	802,936,833
Total			1,103,801,138

Su mber : SK Jalan Kab. Konawe Utara (diolah)

Program Penanganan Jalan dengan Skenario Alokasi Dana 25 % Ketersediaan Dana

Pemeliharaan jalan di wilayah ibu kota kabupaten pemeliharaan rutin diberikan kepada 6 ruas jalan dengan total panjang 24,38 km, pemeliharaan berkala diberikan

kepada 6 ruas jalan dengan total panjang 2,30 km, peningkatan diberikan kepada 2 ruas jalan dengan total panjang 0,38 km dan rekonstruksi diberikan kepada 1 ruas jalan dengan total panjang 0,63 km. Total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 587.496.472,00.

Tabel 8. Biaya Penanganan dengan Alokasi Dana 25 %

No.	Jenis Penanganan	Panjang Ruas Jalan (KM)	Alokasi Biaya (Rp)
1	Rutin	24,38	71,191,806
2	Berkala	2.30	13,417,815
3	Peningkatan	0.38	101,418,434
4	Rekontruksi	0.63	401,468,416
Total			587,496,472

Su mber : SK Jalan Kab. Konawe Utara (diolah)

Program Penanganan Jalan Sesuai Kemampuan Daerah Kabupaten Konawe Utara (75,95 % Ketersediaan Dana)

Pemeliharaan jalan di wilayah ibu kota kabupaten pemeliharaan rutin diberikan kepada 6 ruas jalan dengan total panjang 24,38 km, pemeliharaan berkala diberikan kepada 6 ruas jalan dengan total panjang 7

km, peningkatan diberikan kepada 2 ruas jalan dengan total panjang 1,5 km dan rekonstruksi diberikan hanya kepada 1 ruas jalan dengan total panjang 5,82 km. Total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 2.136.410.469,00. Karena keterbatasan dana, maka penanganan jalan di disesuaikan dengan kemampuan daerah. Adapun resume alokasi biaya per jenis penanganan ditampilkan dalam Tabel 8.

Tabel 8. Biaya Penanganan dengan Alokasi Dana sesuai Kemampuan Daerah Kabupaten Konawe Utara

No.	Jenis Penanganan	Panjang Ruas Jalan	Alokasi Biaya (Rp)
1	Rutin	24,38	71,191,806
2	Berkala	9.19	53,671,261
3	Peningkatan	1.50	405,673,735
4	Rekontruksi	1.70	1,091,994,093
Total			1,622,530,896

Sumber : SK Jalan Kab. Konawe Utara (diolah)

Mekanisme Pembiayaan Pemeliharaan Jalan Kota Wanggudu Kabupaten Konawe Utara

Berdasarkan tahun anggaran berjalan perencanaan program dilakukan untuk

rencana penanganan tahun berikutnya, proses program usulan diawali dengan identifikasi ruas-ruas jalan yang akan dilakukan penanganan pemeliharaan jalan dengan memperhatikan catatan atau laporan tentang tingkat kerusakan jalan pada ruas-ruas jalan

kabupaten secara umum. Selanjutnya dilakukan survei, investigasi, pengukuran serta data lainnya yang terkait. Perencanaan teknis selalu dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Ibu Kota Kabupaten Konawe Utara baik survei lapangan maupun pelaksanaan perhitungan teknis analisis sampai kepada perhitungan rencana anggaran biaya.

Dokumen perencanaan teknis ini dijadikan dasar untuk memenuhi kriteria format Program Pembangunan Daerah Tahunan, selanjutnya disebut RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja), setelah pembahasan RASK pada Tim Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat Kabupaten, dalam kegiatan ini akan ditentukan estimasi besaran alokasi pembiayaan pemeliharaan jalan dan termasuk skala prioritas, disandingkan dengan alat control atau dokumen lain perencanaan daerah berupa RKPD (Rencana Kegiatan Perangkat Daerah).

Hasil rapat Musrenbang Kabupaten dan Dokumen RKPD menjadi patokan bagi Panitia Anggaran Eksekutif dalam menilai kelayakan dan prioritas kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hasil kerja Panitia Anggaran Eksekutif akan menjadi dokumen usulan RAPBD tahun berjalan, bersama Panitia Anggaran Legislatif melakukan pembahasan intensif sehingga menghasilkan Rancangan APBD yang selanjutnya disahkan menjadi Peraturan Daerah Ibu Kota Kabupaten Konawe Utara sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD Ibu Kota Kabupaten Konawe Utara.

Masing-masing perangkat daerah termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Ibu Kota Kabupaten Konawe Utara mempersiapkan (DASK) Daftar Anggaran Satuan Kerja salah satunya adalah DASK Pemeliharaan Jalan Kabupaten di Kota Konawe Utara, selanjutnya bersamaan dengan pembentukan organisasi pelaksana kegiatan dan kepanitiaan dalam rangka pelaksanaan pelelangan, kemudian dilakukan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan.

Sumber pendanaan terhadap pemeliharaan jalan di Kota Wanggudu, Kabupaten Konawe Utara adalah berasal dari APBD Provinsi hingga Kabupaten.

Pendanaan pemeliharaan jalan yang berasal dari APBN tidak dialokasikan, hal ini lebih didasarkan pada ketersediaan jalan yang ada di Kota Konawe Utara merupakan jaringan jalan dengan status jalan provinsi dan jalan kabupaten, sehingga kewenangan nasional/negara terhadap pendanaan pemeliharaan jalan di Kota Konawe Utara tidak ada. Implikasi positif terhadap pemberian kewenangan pengelolaan pendanaan pemeliharaan jalan terhadap keuangan daerah antara lain:

- a. Meningkatkan keleluasaan daerah dalam memanfaatkan dana alokasi umum
- b. Beralihnya prioritas pembangunan dari sektoral menjadi regional
- c. Daerah mendapat prioritas alokasi dana sesuai dengan kebutuhannya.
- d. Terjadi pengalokasian dana sesuai skala prioritas daerah dan akuntabilitas yang lebih besar karena penguasaan lebih kuat ditingkat lokal (mekanisme check and balance)
- e. Memberikan penegasan kewenangan kepada daerah untuk lebih rasional dalam pemanfaatan sumber penerimaan daerah. Daerah akan lebih bertanggung jawab atas pemanfaatan dana dan mengurangi ketergantungan terhadap arahan dan petunjuk pusat. Hal ini merupakan proses untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam pembiayaan otonominya
- f. Perlunya kontrol dan peran yang lebih kuat dari DPRD terhadap pemanfaatan dana untuk kepentingan daerah yang selama ini lebih ditentukan oleh pihak eksekutif atas dasar arahan dan petunjuk dari pusat
- g. Secara bertahap terjadi rasionalisasi terhadap kewenangan-kewenangan dari pembiayaan yang tidak perlu.

Kondisi pendanaan pemeliharaan jalan di Kota Konawe Utara dirinci sebagai berikut:

- 1) Pendanaan pemeliharaan jalan bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) baik Provinsi maupun kabupaten sesuai dengan sasaran pemeliharaan jalan tersebut berupa jalan provinsi atau jalan kabupaten.

- 2) Dalam pengalokasian DAU dan DAK untuk jalan digunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bagi infrastruktur jalan.
- 3) Dari alokasi DAU, penanganan yang dilakukan yaitu pemeliharaan, peningkatan dan pelebaran jalan.
 - 4) Kabupaten Konawe Utara akan mendapatkan DAK jika sumber daya keuangannya belum mencukupi pada penganggaran suatu pemeliharaan jaringan jalan, tetapi kebutuhannya akan sangat mendesak, serta panjang jalannya masih kurang dari 'SPM jaringan jalan' yang telah ditetapkan. DAK diberikan dengan maksud untuk menjamin pelaksanaan SPM yang telah ditetapkan.
- 5) DAK digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan jalan bagi daerah yang panjang jalannya masih berada di bawah 'SPM Jaringan Jalan'.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di di Ibu Kota Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Kota Wanggudu), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari 15 ruas jalan yang diteliti pada tahun 2018 menunjukkan bahwa pemeliharaan rutin diberikan kepada 6 ruas jalan dengan total panjang 24,38 km, kemudian pemeliharaan berkala diberikan kepada 6 ruas jalan dengan total panjang 7 km, serta peningkatan diberikan kepada 2 ruas jalan dengan total panjang 1,5 km dan rekonstruksi diberikan hanya kepada 1 ruas jalan dengan total panjang ruas jalan 5,82 km dengan membutuhkan total anggaran sebesar Rp. 2.136.410.469,00.
2. Dari alokasi dana berdasarkan kemampuan daerah Kabupaten Konawe Utara menunjukkan bahwa realisasi pembiayaan untuk pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan dan rekonstruksi sebesar 75,95% dengan total anggaran sebesar Rp. 1.622.530.896,-

3. Kebijakan pembiayaan pemeliharaan jalan di kota wanggudu kabupaten Konawe Utara dalam penentuan prioritas pemeliharaan ruas jalan teridentifikasi masih adanya campur tangan yang kuat dari pihak legislatif dalam penentuan hasil akhir program penanganan.
4. Hasil analisis teknis yang dilakukan berdasarkan survei teknis oleh instansi/lembaga yang berwenang terhadap perencanaan jalan (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Utara) tidak sepenuhnya merupakan hasil akhir dari penentuan prioritas program pemeliharaan jalan, meskipun analisis teknis yang dilakukan telah didasarkan pada hasil Musrenbang hingga tingkat dusun/desa.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Menetapkan struktur organisasi pengelola jalan disertai tugas dan fungsinya yang telah sesuai dengan era otonomi daerah ke dalam suatu peraturan, agar menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Alokasi anggaran pemeliharaan jalan secara konsisten dalam setiap tahun APBD Kabupaten Konawe Utara ke dalam Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Bupati Konawe Utara.
3. Untuk menghindari program pembangunan berdasarkan aspek teknis yang tidak tepat sasaran, maka di dalam hasil pembahasan dengan DPRD sebelum disahkan untuk disosialisasikan kepada masyarakat, diperlukan adanya *transparansi* untuk mewujudkan *good governance* untuk hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Armada. T.P. 2014. Analisa ekonomi perbaikan jalan Palembang-Betung Kabupaten Banyuasin terhadap nilai kerugian akibat kemacetan. *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*. Vol. 2. No.3, September 2014.
- Haris. 2016. Model Prediksi anggaran biaya pemeliharaan jalan provinsi di Kabupaten Sampang. *Jurnal Sipil*, Vol. 1, No. 1. (2016).
- Mathew.B.S., Isaac. K.P. 2013. Optimisation of maintenance strategy for rural road network using genetic algorithm. *International Journal of Pavement Engineering*. Volume 15,2104-Issue 4.
- Prabowo. D.R., Mulyono. A.T. 2016. Program pemeliharaan jalan Nasional berdasarkan nilai kerataan permukaan, nilai lendutan, dan nilai modulus elastisitas pekerjaan. *Jurnal HPJI*, Vol. 2 No. 1 Januari 2016: 63-70.
- Pramono. A.P., Syafi'i. , Pramesty. F.P. 2016. Skenario pemeliharaan jalan di Kota Tangerang berdasarkan nilai SDI. *Jurnal Nasional Sains dan Teknologi, p- ISSN : 2407 – 1846*.
- Pradity. N., Arliansyah. A., Buchari. E. 2017. Pengembangan program penanganan jalan menggunakan GIS di Provinsi Sumatera Selatan. *Prosiding Simposium II-UNIID*. Palembang.
- Rayendra. 2019. Analisis alternative pemilihan biaya siklus hidup pada masa pemeliharaan ruas jalan Janti-Prambanan KM 7+759-8+750. *Jurnal Teknisia*, Volume XXIV, No 1, Mei 2019
- Setianingsih.A.I., Sangaji.S., Setyawan. A. 2016. Road maintenance and rehabilitation program using functional and structural assessment. *IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering*, 176 (2017) 012030.
- Wirnanda. I., Anggraini. R., Isya. M. 2018. Analisis tingkat kerusakan jalan dan pengaruhnya terhadap kecepatan kendaraan (Studi kasus :jalan Blang Blintang Lama dan jalan Teungku Hasan Dibakoi. *Jurnal Teknik Sipil Universitas Syah Kuala*. Volume 1 Special Issue, Nomor 3, 617-626.
- Zukhruf. 2019. Model optimasi pemeliharaan jalan multi tahun dengan batasan anggaran. *Jurnal Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung*, Vol. 26, No.2 (2019).
- Zhang. L.X., Qin.J., Xin He. Y., Lin Ni.L. 2015. Network-level optimization method for road network maintenance programming based on network efficiency. *Journal of Central South University*. December 2015, Volume 22, Issue 12, pp 4882–4889